



# LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Instansi  
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  
TANJUNGPINANG

HP  
bkipmtanjungpinang@kcp.go.id

## KATA PENGANTAR

Setiap entitas akuntabilitas kinerja diharuskan menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada akhir tahun anggaran sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja (LKj) Tahunan Tahun 2024 Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang juga mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan kinerja organisasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 62/PER-BKIPM/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Lkj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya sehingga menjadi terukur dan menjadi penilaian Kinerja organisasi.

Pada akhirnya kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 05 Januari 2025  
Kepala,



Arrofik, S.Pi.,M.H

## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	5
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	9
BAB 4. PENUTUP	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024.....	7
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 .....	10
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Strategis 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya .....	12
Tabel 3.3.	Capaian Sasaran Strategis 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya .....	16
Tabel 3.4.	Capaian Sasaran Strategis 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya .....	18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang .....	3
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2024 .....	9
Gambar 3.2.	Nilai rekomendasai hasil pengawasan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 pada Aplikasi SIDAK .....	21

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Tahun merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang hingga akhir tahun 2024 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Balai KIPM Tanjungpinang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2024.

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang telah menetapkan target kinerja Tahunan Tahun 2024 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Balai KIPM Tanjungpinang dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang semula terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Balai KIPM Tanjungpinang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Tanjungpinang pada Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)
  - b. Persentase hasil kelautan dan Perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)
  - c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)

2. Sasaran strategis 2 yaitu terselenggaranya Pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nilai Pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)
  - b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai Indeks)
  
3. Sasaran Strategis 3 yaitu Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk SS ini adalah sebagai berikut:
  - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang target Tahun 2024 adalah 86
  - b. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker Balai KIPM Tanjungpinang, target tahun 2024 nilainya 82
  - c. Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang, target tahun 2024 adalah 100%
  - d. Nilai indikator kinerja anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang, target tahun 2024 nilainya 93,76.
  - e. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang, target tahun 2024 nilainya 71.
  - f. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang, target tahun 2024 adalah 80%.
  - g. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang target tahun 2024 adalah 80%
  - h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Balai KIPM Tanjungpinang target Tahun 2024 sebesar 80%

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang Tahun 2024 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Tanjungpinang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Tanjungpinang pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

# BAB I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan berorientasi pada pertumbuhan, pemerataan, dan modernisasi. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Visi KKP adalah "Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional". dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berdaulat, berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat memposisikan Badan Ikan di lini terdepan sebagai instrument perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peran strategis ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penguatan ekspor maupun pengendalian impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perantaraan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Tanjungpinang yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

## **Tujuan**

Pelaporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini di susun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tanjungpinang di Tahun 2024 dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak pihak terkait tentang kinerja Balai KIPM Tanjungpinang yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kinerja di masa mendatang.

## **Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Tanjungpinang**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dantersebaranya Hama dan Penyakit Ikan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Tanjungpinang mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan /Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan , Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan , mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran peran ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi peran ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 terdiri dari:

## **1. Kepala**

Balai KIPM Tanjungpinang merupakan unit pelaksana teknis Badan Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Tanjungpinang adalah jabatan struktural Eselon III yang membawahi 1 Jabatan Struktural eselon IV yang terdiri dari 2 Subkoordinator Wasdalin dan Subkoordinator Tata Pelayanan dan 1 Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya

## **2. Kasubbag Umum Tata Usaha**

Kasubbag Umum Tata Usaha pada Balai Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Tanjungpinang mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Operasional**

Subkoordinator Kelompok Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan , dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan , pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan , Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan

laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

#### **4. Subkoordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian dan Informasi**

Subkoordinator Kelompok Pengawasan, Pengendalian, dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi peran ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Ikan. Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi Laporan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif:** bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama Triwulan 1 sampai dengan Tahunan Tahun 2024
2. **BAB I. Pendahuluan,** menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Balai KIPM Tanjungpinang.
3. **BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,** menjelaskan muatan rencana Strategis Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Triwulan 1 sampai dengan Tahunan Tahun 2024
4. **BAB III, Akuntabilitas Kinerja,** menjelaskan analisis pencapaian kinerja berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.
5. **BAB IV. Penutup,** menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran Tahun 2024, disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
6. **Lampiran-lampiran,** memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Balai KIPM Tanjungpinang, Rencana Strategis 2022 - 2024, serta Penetapan Kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

### RENCANA STRATEGIS 2022 -2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai KIPM Tanjungpinang telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 4 (empat) Tahun yaitu 2022-2024 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Adapun RENSTRA Balai KIPM untuk tahun 2022-2024 belum disusun karena masih menunggu penetapan RENSTRA 2022-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Balai KIPM Tanjungpinang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan Visi dan Misi Badan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Balai KIPM Tanjungpinang dalam mendukung pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Balai KIPM Tanjungpinang 2022-2024 adalah sebagai berikut:



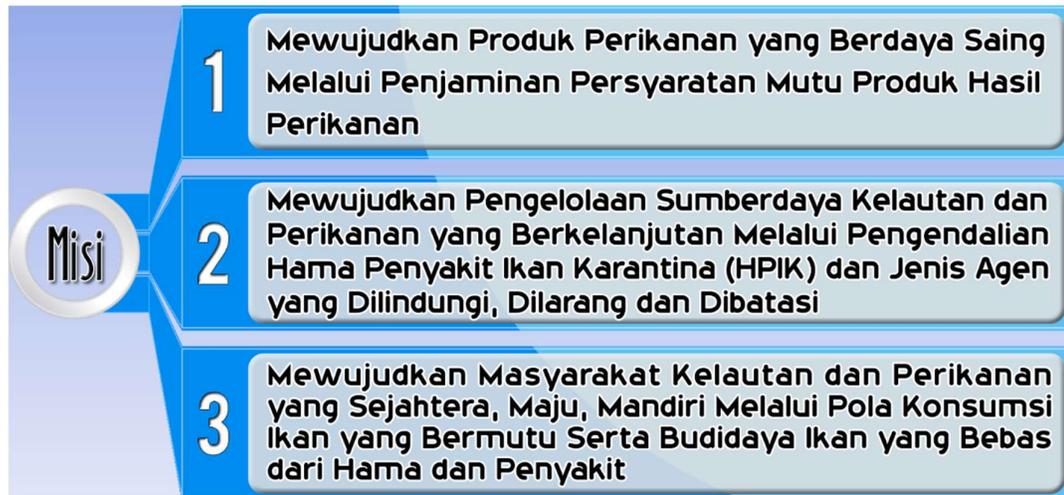
Makna dari visi dapat diuraikan sebagai berikut:

**Hasil perikanan:** mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

**Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi:** mengandung arti hasil perikanan yang bebas dari hama penyakit ikan (Sehat), memiliki kualitas teknis dengan persyaratan standart yang telah ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi)

**Terpercaya:** mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan ikan, pengendalian mutu

dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan interanasional.



### Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah ***melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional***

### Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yaitu:

1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan;
4. Terselenggaranya Sistem Peran, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan yang Sesuai Standar;
5. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Peran, Mutu dan Keamanan Hayati Ikan Secara Profesional dan Partisipatif;
6. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Balai KIPM Tanjungpinang Yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas;
7. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Balai KIPM Tanjungpinang yang Handal dan Mudah Diakses;

8. Terwujudnya Birokrasi Balai KIPM Tanjungpinang Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima;
9. Terkelolanya Anggaran Pembangunan Balai KIPM Tanjungpinang Secara Efisien dan Akuntabel.

### **Arah Kebijakan Balai KIPM Tanjungpinang**

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional serta kegiatan. Sebagai suatu alat dari strategi tersebut, kebijakan dan program akan memberikan arah dan kesatuan pandangan bagi setiap unsur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

### **Kebijakan Pembangunan Badan Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM)**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Balai Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang, maka strategi yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan.

Arah kebijakan Badan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam mendukung kebijakan nasional dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan peran ikan adalah "Kedaulatan, Keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat". Kebijakan Balai Ikan Tanjungpinang disesuaikan dengan arah Kebijakan BKIPM. Adapun Kebijakan Balai KIPM Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu diperlukan upaya melalui strategi:
  - a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan pencegahan penyebaran penyakit ikan antar zona dalam wilayah RI.

- b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
  2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan melalui strategi:
    - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan , pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
      - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
      - Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara tujuan
      - Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
      - Sertifikasi penerapan Cara Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
      - Penerapan sistem traceability pada Unit Pengolahan Ikan
      - Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
      - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
      - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001) tahun 2015, sistem manajemen inspeksi (ISO 17020) tahun 2012, dan sistem layanan laboratorium (ISO 17025) tahun 2008
    - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang Implementatif
      - Harmonis sistem, peran ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
      - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
  - b. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - c. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

## Rencana Kinerja 2024

Rencana kinerja Tahunan Tahun 2024, yang disusun dengan pendekatan balance scorecard, masih merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang 2022 -2024 karena untuk Rencana Strategis Balai KIPM Tanjungpinang 2022-2024 belum disusun, masih menunggu penetapan RENSTRA KKP tahun 2022-2024, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pada tingkat Balai KIPM Tanjungpinang diimplementasikan dalam penetapan target kinerja Tahun 2024 dan peta strategi (*strategy map*) Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat eselon IV sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana Tabel 1.

**Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024 Berbasis Balance Scorecard.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	70
		5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai indeks)	3,36
SK.3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai indeks)	86
		7.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai)	82
		8.	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	100
		9.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai)	93,76
		10.	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (Nilai)	71
		11.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	80
		12.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	80
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjung Pinang (%)	80

## Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	237,000,000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	134,000,000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	4,304,534,000
<b>Total Anggaran Balai KIPM Tanjung Pinang Tahun 2024</b>		<b>4,675,534,000</b>

### Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang

Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 di arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Balai KIPM Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 sebesar (Pagu Awal) Rp. 4.675.534.000,-.

Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Tanjungpinang untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel.

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN TAHUN 2024

### Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahunan Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjian Tahun 2024 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Balai KIPM Tanjungpinang menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif yaitu Stakeholder Perspective, Costumer Perspective, Internal Process Perspective dan Learning And Growth Perspective.

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2024 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement) yang masih disesuaikan dengan renstra Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2022 - 2024, kinerja sasaran strategis merupakan resultante kinerja Balai KIPM Tanjungpinang.

Capaian atas 13 (tiga belas) Indikator Kinerja dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada Balai Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tanjungpinang yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3.1 berikut ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun (2021-2023)			Tahun 2024							Renstra 2022-2024	
		2021	2022	2023	Target 2024	Target TW I 2024	Realisasi TW II 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW IV 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan	1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer	-	-	-	70	--	-	-	81,30%	81,30%	81,30 %		

Perikanan		yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)											
	2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sector Produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)				70	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
	3	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)				99	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar	4	Nilai Pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		70	-	-	-	83,10 %	83,10 %	83,10 %	
	5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai Indeks)		-		3,36	-	-	-	3,85	3,85	3,85	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Indeks)				86	-	-	-	87,24	87,24	87,24	
	7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-			82	-	-	-	77,55	77,55	77,55	

	8	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-	-	100	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
	9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)		-	-	93,76	-	-	-	96,12	96,12	96,12	
	10	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	-	-	-	71	-	-	-	87,49	87,49	87,49	
	11	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		80	-	-	-	100 %	100 %	100 %	
	12	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		80	-	-	-	97,50 %	97,50 %	97,50 %	
	13	Persentase Rekomendasi hasil Pejngawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%)	-	-		80	-	-	-	100 %	100 %	100 %	

## IK.1

### Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah Ukuran dalam menilai seberapa besar Volume atau Jumlah Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Perikanan Budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di Kapal yang telah sesuai dengan standar , kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten;
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah Upaya Pencegahan dan Pengendalian yang Harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia . Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sisjambu;
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
  2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal

Xn= Jumlah dari unsur pembentuk (6)\*)

Berdasarkan Permen KP No. 16 Tahun 2024 tentang kewenangan pembinaan dan pengendalian dalam rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, target dari kegiatan sektor produksi primer sampai dengan akhir Desember 2024 realisasi sebesar 81,30 % pada UPT Balai KIPM Tanjungpinang dilakukan kegiatan Sosialisasi, Bimtek dan sejenisnya. Untuk capaian kinerja mengadopsi nilai capaian Esselon I.

## IK.2

### Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sector produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Pemohonan baru dan perpanjangan sertifikat Hazard:

- UPI mengajukan permohonan;
  - \* Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat PM
  - \* Inspeksi oleh Inspektur Mutu
  - \* Evaluasi dan rekomendasi tim teknis
  - \* Penerbitan sertifikat HACCP
  - \* UPI melakukan tindakan perbaikan
  - \* Verifikasi tindakan perbaikan oleh inspektur mutu.

Pemohonan baru dan perpanjangan sertifikat SKP:

- UPI mengajukan permohonan;
  - \* Dilakukan audit kecukupan oleh Pusat
  - \* Inspeksi oleh Pembina Mutu
  - \* UPI melakukan tindakan perbaikan
  - \* Verifikasi tindakan perbaikan oleh pembina mutu
  - \* Evaluasi dan rekomendasi Pembina Mutu
  - \* Verifikasi oleh Inspektur Mutu

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$

$\%X$  = Persentase hasil kelautan dan perikanan sector pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Poin (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP SSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

Untuk capaian di Tahun Tahun 2024, capaian Sertifikasi HACCP pada Balai KIPM Tanjungpinang meliputi sertifikat yang diterbitkan 8 RL Perpanjangan HACCP (3 UPI) dan Monev Sertifikat HACCP 19 RL (9 UPI) , total capaian sertifikasi = 27 RL. Sedangkan capaian sertifikasi SKP yang diterbitkan meliputi 37 RL.

$$\%X = \frac{A + B}{xn} \times 100\%$$
$$= \frac{100 + 100}{2} \times 100\%$$
$$= 100\%$$

### IK.3

#### Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang.

Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang telah diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (Jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar Internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC) yang ditolak oleh negara tujuan ekspor.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Rasio Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X = Rasio ekspor ikan dan hasil perika yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Sampai dengan Bulan Desember 2024 jumlah HC yang terbit sebanyak 1.006 sertifikat ekspor ke pasar internasional dan tidak ada penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Total Frekwensi Kegiatan Ekspor (A)

Total Penolakan Ekspor (B)

Total Prosentase

$$= \frac{(A-B)}{A} \times 100\%$$

$$= \frac{(1.006-0)}{1.006} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

## Internal Process Perspective

- Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai standar

Terselenggaranya Sistem Jaminan mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun Tahun 2024 adalah Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yakni :

- 1) Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang
- 2) Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang(nilai);

*Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2 Berdasarkan Indikator Kinerjanya*

INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Target TW-4	Realisasi TW-4	% Thd Target Tahunan
1	Nilai Pemenuhan penerapan system manajemen mutu Laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)	70	70	83,10 %	83,10 %
2	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang(nilai)	3,36	3,36	3,85	3,85

#### IK.4

### Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang

Nilai Pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga Inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO /IEC 17025 dan ISO /IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan Tingkat Kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar system manajemen mutu sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan system manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Presentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi

A = Presentase Nilai Penerapan ISO 17020

B = Presentase Penerapan ISO 17025

Untuk Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium penguji ISO/IEC 17025 sebesar 81,35. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi ISO/IEC 17020 sebesar 84,85 . Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar 83,10.

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A+B}{2} \times 100\% \\ &= \frac{81,35+84,85}{2} \times 100\% \\ &= 83.10\end{aligned}$$

## IK.5

### Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tanjungpinang(nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

$$\text{Nilai Internal Konversi IKM} = \text{Nilai Indeks} \times 25$$

Capaian pada Tahun 2024 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat BKIPM Tanjungpinang dilihat dari 9 indikator mendapatkan nilai interval **3,807** dimana dengan nilai setelah dikonversi adalah **96,14 %**. Melihat hasil nilai interval dan nilai konversi maka BPPMHKP Tanjungpinang mengalami peningkatan nilai SKM dan mendapat nilai **mutu pelayanan A** dan oleh karena itu kinerja BPPMHKP Tanjungpinang dapat dikategorikan **Sangat Baik**

## Internal Process Perspective

- Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Capaian kinerja BKIPM pada *Internal Process Perspective* berasal dari sasaran strategis Dukungan Manajemen Internal lingkup BKIPM dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai Indeks);
- 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai);
- 3) Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%) ;
- 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai) ;
- 5) Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai);
- 6) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%);
- 7) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%)
- 8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%) ;

*Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis 3 Berdasarkan Indikator Kinerjanya*

INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Target TW-4	Realiasi TW-4	% Thd Target Tahunan
1	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	86	86	87,24	87,24
2	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang	82	82	77,55	77,55
3	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (%);	100	100	100	100
4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)	93,76	93,76	96,12	96,12
5	Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai);	71	71	87,49	87,49
6	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%);	80	80	100	100

8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang(%)	80	80	97,50	97,50
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)	80	80	100	100

## IK.6

### Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk Satker Balai KIPM Tanjungpinang ditetapkan target pada Tahun Tahun 2024 sebesar 87,24.

Formulasi menghitung capaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BKIPM adalah:

$$Indeks = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

#### Keterangan

- A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan
- B : Persentase capaian output pegawai pada SKP
- C : Persentase tingkat kehadiran pegawai
- D : Persentase LHKPN/LHKASN

## IP ASN Tahun Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024

The screenshot shows the IP ASN 2024 dashboard with a search bar and a table of unit performance data. The table has columns for No, Unit Kerja, Jumlah Pegawai Yang Dihitung, Kualifikasi (bobot 25), Kompetensi (bobot 40), Kinerja (bobot 30), Disiplin (bobot 5), TOTAL, and Keterangan. The data is as follows:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
16	BALAI KIPM SEMARANG	29	21.17	84.68 %	37.69	94.22 %	24.66	82.2 %	5	100 %	88.52	TINGGI
17	BALAI KIPM BANJARMASIN	13	20.54	82.16 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.54	TINGGI
18	BALAI KIPM LAMPUNG	28	21.11	84.44 %	36.19	90.47 %	25	83.33 %	5	100 %	87.29	TINGGI
19	BALAI KIPM AMBON	11	20.82	83.28 %	38.48	96.2 %	25	83.33 %	5	100 %	89.3	TINGGI
20	BALAI KIPM ENTRIKONG	6	20.67	82.68 %	35.42	88.55 %	25	83.33 %	5	100 %	86.08	TINGGI
21	BALAI KIPM TANJUNGPINANG	10	20.6	82.4 %	36.64	91.6 %	25	83.33 %	5	100 %	87.24	TINGGI
22	BALAI KIPM TARAKAN	14	20.36	81.44 %	38.24	95.6 %	25	83.33 %	5	100 %	88.6	TINGGI
23	STASIUN KIPM PALEMBANG	21	21.19	84.76 %	38.06	95.15 %	25.24	84.13 %	5	100 %	89.49	TINGGI
24	STASIUN KIPM BANDUNG	9	21.22	84.88 %	37.22	93.05 %	28.33	94.43 %	5	100 %	91.78	SANGAT TINGGI
25	STASIUN KIPM MERAUKE	12	20	80 %	35.94	89.85 %	25	83.33 %	5	100 %	85.94	TINGGI
26	STASIUN KIPM PONTIANAK	16	20.56	82.24 %	35.62	89.05 %	21.88	72.93 %	5	100 %	83.06	TINGGI
27	STASIUN KIPM KENDARI	12	20.83	83.32 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.83	TINGGI
28	STASIUN KIPM BATAM	7	21.57	86.28 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	91.57	SANGAT TINGGI
29	STASIUN KIPM PADANG	12	19.67	78.68 %	37.92	94.8 %	25	83.33 %	5	100 %	87.58	TINGGI
30	STASIUN KIPM JAMBI	14	21.07	84.28 %	36.64	91.6 %	25.36	84.53 %	5	100 %	88.07	TINGGI

Sumber: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/1445/pegawai>

### IK.7

#### Nilai rekonsiliasi kinerja / Mandiri SAKIP satker lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (nilai)

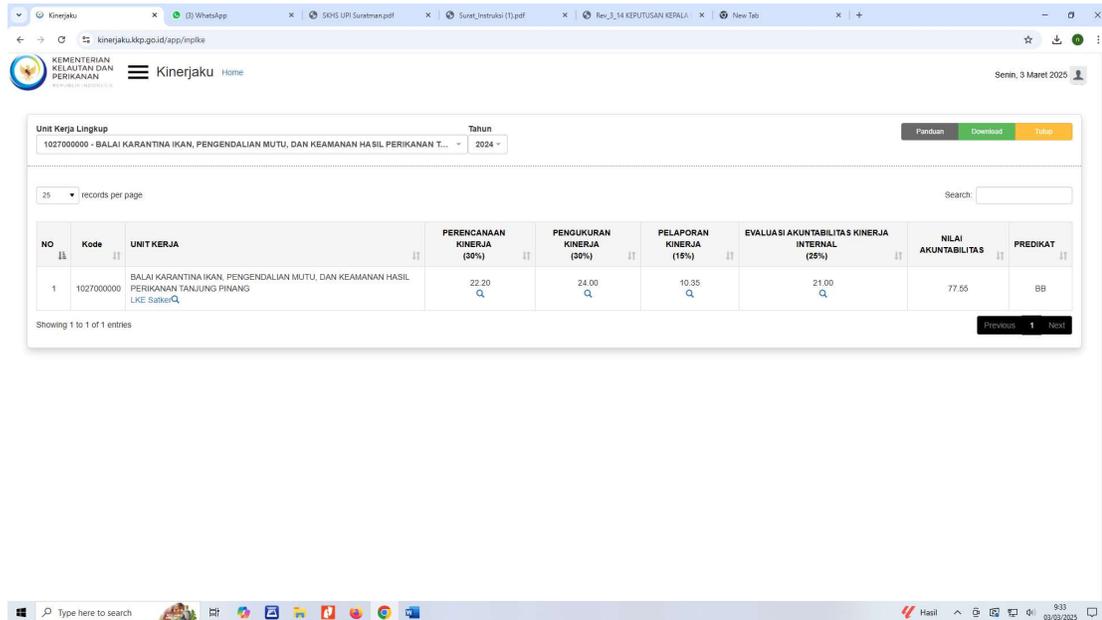
Nilai rekonsiliasi kinerja atau Penilaian Mandiri SAKIP dilakukan dengan mengeksaminasi 3 aspek, yaitu Kepatuhan, Kesesuaian dan Ketercapaian. Agar pembahas rekonsiliasi dapat melakukan eksaminasi maka unit kerja harus memiliki dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung tersebut meliputi:

- ❖ Perjanjian Kinerja;
- ❖ Manual IKU;
- ❖ Rincian Target IKU;
- ❖ Rencana Aksi;
- ❖ Laporan Kinerja Interim;
- ❖ Laporan Capaian Kinerja;
- ❖ Dokumen Data Dukung LKj.

Rekonsiliasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen tersebut, serta keabsahan dan membandingkan hasil yang ada didalam dokumen dengan hasil yang telah diinput kedalam aplikasi Kinerjaaku.

Satker Balai KIPM Tanjungpinang memiliki target pada Tahun dengan nilai rekonsiliasi sebesar 82, pada Tahun 2024 Penilaian Mandiri SAKIP teralisasi senilai 77,55.

### Penilaian Mandiri SAKIP TW.4 Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang TA 2024



The screenshot shows the Kinerjaku web application interface. At the top, there are navigation tabs for 'Kinerjaku', 'Home', and 'Semn, 3 Maret 2025'. Below the navigation, there is a header for 'Unit Kerja Lingkup' with a dropdown menu showing '1027000000 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN T...' and a year selector set to '2024'. The main content area displays a table with the following data:

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1027000000	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG LKE SatkerQ	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 1 of 1 entries' and a 'Previous 1 Next' button.

## IK.8

### Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Tanjungpinang merupakan bentuk tindak lanjut atas penyelesaian temuan BPK tersebut. Pada Tahun 2024 target yang ditetapkan adalah 100% dimana pengukurannya dilaksanakan pada tahun 2024.

## IK.9

### Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini dinilai dari: Revisi DIPA (5%), Halaman III DIPA (5%), Pengelolaan UP (8%), Rekon LPJ Bendahara (5%), Data Kontrak (15%), Penyelesaian Tagihan (12%), Penyerapan Anggaran (15%), Retur SP2D (5%), Pengembalian SPM (5%), Dispensasi Penyampaian SPM (5%), dan Pagu Minus (5%). Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Capaian kinerja untuk IKU Nilai IKPA UPT Balai KIPM Tanjungpinang mengadopsi hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DIPENCASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	009	032	649640	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG	Nilai	100,00	90,89	95,45	0,00	0,00	91,76	100,00	76,90	80%	0,00	96,12
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10,00	13,83	19,09	0,00	0,00	9,18	25,00				
					Nilai Aspek		95,45			93,81		100,00				

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/> >>> MONEVPA

## IK.10.

### Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran Lingkup UPT Balai KIPM Tanjungpinang

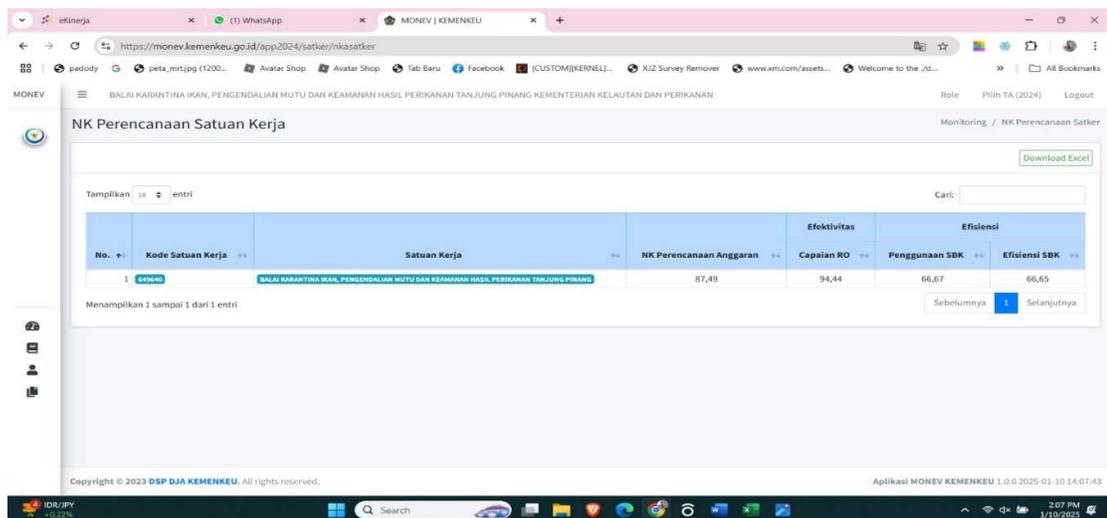
Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011.

$$NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

- P** : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)
- K** : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)
- PK** : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%)
- E** : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%).

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Balai KIPM Tanjungpinang pada Tahun 2024 dimana dari target yang ditetapkan nilai sebesar 71 dan di Tahun 2024 teralisasi senilai 87,49.



The screenshot displays the 'NK Perencanaan Satuan Kerja' interface. It features a table with the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas (Capaian RO)	Efisiensi (Penggunaan SBK)	Efisiensi (Efisiensi SBK)
1	61040	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG	87,49	94,44	66,67	66,65

Additional details from the screenshot: The interface includes a search bar, a 'Download Excel' button, and navigation options like 'Sebelumnya' and 'Selanjutnya'. The footer indicates the application version as 'Aplikasi MONEV KEMENKEU 1.0.0 2025-01-10 14:07:43'.

## **IK.11**

### **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target tingkat kepatuhan PBJ Balai KIPM Tanjungpinang Tahun tahun 2024 adalah 80% dan di Tahun Tahun 2024 teralisasi 100 %.

## **IK.12**

### **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BKIPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset)
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Balai KIPM Tanjungpinang pada Tahun 2024 ini sebesar 80 %. Pada Tahun 2024 teralisasi 97,50 %.

No	Unit Kerja	Target	Tingkat Kepatuhan	Keterangan
39	Balai KIPM Jayapura	80,00 %	97,50 %	Tercapai
40	Stasiun KIPM Merak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
41	Stasiun KIPM Bengkulu	80,00 %	97,50 %	Tercapai
42	Stasiun KIPM Tempe	80,00 %	97,50 %	Tercapai
43	Balai Besar KIPM Jakarta I	80,00 %	97,50 %	Tercapai
44	Stasiun KIPM Merak	80,00 %	97,50 %	Tercapai
45	Stasiun KIPM Pangkalpinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
46	Stasiun KIPM Gorontalo	80,00 %	97,50 %	Tercapai
47	Stasiun KIPM Batam	80,00 %	97,50 %	Tercapai
48	Balai KIPM Tanjung Pinang	80,00 %	97,50 %	Tercapai
49	Stasiun KIPM Sorong	80,00 %	97,50 %	Tercapai
50	Stasiun KIPM Mamuju	80,00 %	97,50 %	Tercapai
51	Balai KIPM Tumbang	80,00 %	97,50 %	Tercapai

Sekretaris Badan Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, dan  
Keamanan Hasil Perikanan

Hari Muryadi

### IK.13

#### Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Tanjungpinang (%)

Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BKIPM berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK. Balai KIPM Tanjungpinang pada Tahun 2024 terdapat nilai LHP nya sebesar 100% dengan target 80% sehingga capaiannya 100%.

BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNGPINANG	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 98.88%
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	STASUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI
STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%

Gambar 3.2 Nilai rekomendasi hasil pengawasan Balai KIPM Tanjungpinang pada tahun 2024 pada aplikasi SIDAK

## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahunan Tahun 2024, dari 26 Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Tanjungpinang yang telah ditetapkan. Secara umum, rata-rata capaian indikator kinerja Balai KIPM Tanjungpinang pada Tahun 2024 sesuai dengan target, yang berarti capaian kinerja Balai KIPM Tanjungpinang di Tahun 2024 boleh dikatakan baik.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun Tahun 2024 dalam mendukung pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai Balai KIPM Tanjungpinang serta semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Keberhasilan di atas merupakan hasil dari penyelesaian kendala/hambatan yang terjadi selama Tahun 2024 antara lain Adanya perubahan mekanisme di KPPN sehingga beberapa kegiatan pelaksanaannya relatif terhambat. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi lamban pada Tahun. Hambatan/kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui pelaksanaan beberapa kegiatan seperti:

1. Evaluasi setiap triwulan dalam rangka koordinasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Balai KIPM Tanjungpinang.
2. Terjadinya Revisi Anggaran pada Tahun terkait Blokir Belanja Barang Tahun Anggaran 2024.

Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan mendatang antara lain:

1. Perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terukur dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.
2. Perlu adanya pertemuan khusus yang membahas tentang penetapan dan cara pengukuran indikator kinerja utama dan manual IKU guna memudahkan pada saat pengukuran kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
4. Perlunya penajaman target indikator kinerja utama Balai KIPM Tanjungpinang, mengingat terdapat beberapa IKU yang tingkat capaian Tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan Tahun 2024.
5. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan IKU Balai KIPM Tanjungpinang untuk periode 2022-2024, termasuk juga dalam metode *cascading* ke level atau unit bawahnya.
6. Mendorong untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
7. Ketersediaan anggaran yang belum memadai menjadi penyebab pelaksanaan dalam mendukung pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan belum optimal.
8. Memberikan *reward and punishment* untuk setiap pegawai di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.

Dengan melihat kecenderungan kondisi dimasa mendatang, dalam mendukung pembangunan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pengembangan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2022-2024.

Akhirnya Laporan Kinerja Tahunan Balai KIPM Tanjungpinang Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operation plan*), Rencana Kinerja (*Performance plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) Strategic Plan) di lingkungan Balai KIPM Tanjungpinang di masa mendatang.

Tanjungpinang, 05 Januari 2025  
Plh. Kepala,



**Arrofik**